

ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH DENGAN PENDEKATAN SEKTORAL DAN REGIONAL DI KABUPATEN BOGOR

(The Analysis of Regional Development Using Regional and Sectoral Approach in Bogor Regency)

Valentin Retnowati Christin Zai dan Pangli

Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

E-mail : vzai59403@gmail.com

ABSTRAK

Beberapa negara berkembang termasuk Indonesia masih menempatkan pembangunan sebagai pembangunan fisik yang berupa sarana prasarana dan infrastruktur pendukung berdasarkan hukum atau tatanan kebijakan yang berlaku. Diperlukan sebuah perencanaan pengembangan wilayah untuk mendukung pembangunan fisik tersebut. Perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sektoral dan regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan wilayah Kabupaten Bogor dengan pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral difokuskan pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut dan pendekatan regional untuk melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Pendekatan sektoral terdiri dari analisis berbasis ekonomi dan sektor unggulan. Pendekatan regional terdiri dari analisis ekonomi wilayah dan struktur ruang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui pencatatan dokumen dari instansi terkait. Setelah masing-masing pendekatan memperoleh hasil, kemudian dikaitkan menggunakan analisis keterkaitan pendekatan sektoral dan regional. Hasil penelitian berupa arahan pengembangan wilayah berdasarkan prioritas pembangunan ekonomi sektor unggulan yaitu pertambangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi. Serta melalui pengembangan sektor berkembang yaitu industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, perdagangan, reparasi otomotif yang termasuk sektor basis dan memiliki daya saing, pengembangan sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi besar pada PDRB serta memberikan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi. Pengembangan sektor yang berpotensi di masa depan dan pengembangan sektor unggulan dapat diarahkan sebagai pusat pelayanan PKL dan PKLp yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Kata kunci: *pengembangan wilayah, pendekatan sektoral, pendekatan regional*

ABSTRACT

Some developing countries such as Indonesia locate the development as a physical infrastructure based on applicable law or policy order. Thus a regional development plan is needed to support the physical development. Both national and regional development planning are using sectoral and regional approaches. The aim of this study is to analyze the development of Bogor Regency region with the sectoral and regional approach. The sectoral approach focuses on the sector's existing activities in the region and the regional approach to view space utilization as well as the interaction of various activities within the territory. The sectoral approach consists of economic and sector-based analysis. The regional approach consists of the analysis of the region's economy and space structure. The data used is collected through the recording of documents from relevant agencies. Then the results are linked using a linkage analysis of sectoral and regional approaches. The result of research in the direction of regional development based on the priority of economic development of the leading sectors namely mining, construction, and accommodation provision. As well as the development of developing sectors ie manufacturing industry, water supply, waste management, trade, automotive reparation including the base sector and competitiveness, the development of processing industry sector which has a large contribution to PDRB as well as providing welfare and economic improvement. The development of potential future sectors and the development of leading sectors can be directed at a service center for PKL and PKLp that serves the scale of the district or some subdistricts.

Keywords : *regional development, sectoral approach, regional approach*

PENDAHULUAN

Kajian perencanaan dan pengembangan wilayah di Indonesia menjadi semakin menarik setelah diberlakukannya Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 (Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju, 2011). Di Indonesia dan beberapa negara berkembang pembangunan sering diartikan sebagai pembangunan fisik berupa sarana prasarana dan infrastruktur pendukung berdasarkan hukum atau tatanan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan pengembangan wilayah untuk mendukung pembangunan yang bersifat fisik dan pembangunan yang bersifat membangun manusianya juga.

Perencanaan ruang wilayah ditekankan pada perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas ditekankan pada perencanaan pengembangan wilayah (Tarigan, 2004). Kedua tipe perencanaan ini haruslah saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, perencanaan ruang dan perencanaan aktivitas haruslah saling terkait dalam pelaksanaannya. Wilayah yang akan dikembangkan memiliki keterkaitan spasial antarwilayah dan menunjukkan bentuk-bentuk wilayah yang kompak dengan bentuk lingkaran yang sempurna. Sebuah wilayah diarahkan pengembangannya sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut seperti kegiatan ekonomi yang berkembang, karakteristik dan komponen penduduk dan pusat-pusat pelayanan di wilayah tersebut.

Tata ruang Kabupaten Bogor terdiri dari rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan. Oleh karena itu pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor didasarkan pada perencanaan yang memadukan pendekatan sektoral dan regional dalam perencanaan pengembangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah dalam struktur ruang diidentifikasi dengan pengelompokan wilayah yang berkarakteristik maju, berkembang, lamban dan terbelakang. Gaya tarik-menarik antar wilayah juga menjadi aspek regional untuk mengetahui tingkat interaksi antarwilayah. Interaksi antarwilayah ini didasarkan pada jumlah penduduk wilayah yang satu dengan yang lainnya dan jarak antar kedua wilayah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, isu dan permasalahan pengembangan wilayah yang masih terdapat di Kabupaten Bogor antara lain: 1) masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia; 2) masih rendahnya ekonomi masyarakat; 3) belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah; dan 4) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan isu tersebut diketahui bahwa pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor belum maksimal. Isu dan permasalahan ini juga hampir sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang disusun dalam isu-isu strategis. Hal ini menyebabkan Kabupaten Bogor memerlukan pengembangan wilayah dengan menggunakan pendekatan sektoral dan regional. Pada pendekatan sektoral, pengembangan wilayah akan diarahkan pada sektor unggulan dan berkembang yang didukung dengan pembangunan manusia yang mencakup ketenagakerjaan serta komponen penduduk. Sedangkan pendekatan regional digunakan untuk mengetahui pemanfaatan ruang wilayah dan penggunaan ruang untuk kegiatan ekonomi yang didukung oleh konektivitas atau aksesibilitas ruang.

Pendekatan sektoral dan regional juga secara tersirat terdapat di RPJMD Kabupaten Bogor hanya saja ada beberapa konsep pendekatan sektoral dan regional yang belum diterapkan untuk mendapatkan arahan pengembangan wilayah. Selain itu juga belum adanya keterkaitan antara sektor ekonomi terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan keterkaitan pemanfaatan ruang wilayah terhadap kegiatan ekonomi. Padahal dengan adanya pengembangan wilayah dalam suatu daerah dapat merangsang perubahan struktural secara cepat. Hal ini juga merangsang reformasi sosial khususnya untuk meningkatkan distribusi pembangunan. Dua aspek yang terkait ini, arahan pengembangannya akan ditekankan pada pemanfaatan ruang yang saling berkesinambungan dan berkelanjutan

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan pendekatan sektoral dan regional dalam analisis pengembangan wilayah dari aspek kependudukan dan sosial, ekonomi wilayah dan pemanfaatan ruang. Hasil analisis dari beberapa teknik analisis akan digunakan untuk menentukan arahan pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor dengan penggunaan rencana tata ruang atau rencana pembangunan daerah yang telah ada. Hal ini juga dapat digunakan untuk melihat potensi sektor dan wilayah perencanaan yang akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang serasi dan seimbang dalam setiap aspek penataan ruang. Dengan menganalisis keterkaitan pendekatan sektoral dan

regional dalam pengembangan wilayah. Tujuan penulisan ini adalah melakukan analisis pengembangan wilayah Kabupaten Bogor dengan pendekatan sektoral dan regional.

METODE

Pendekatan Sektoral

Indeks Kontribusi Sektoral (IKS)

Konsep paling sederhana untuk menggambarkan kemampuan sektor basis adalah indeks kontribusi sektoral PDRB, yaitu dengan cara melihat besar kecilnya kontribusi sektor tertentu terhadap perekonomian wilayah secara agregat.

$$IKS = \frac{\text{Nilai PDRB Sektor } (i)}{\text{Nilai PRB Total}} \dots\dots\dots (1)$$

Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang merupakan sektor basis yang dapat mengekspor (ke luar daerah) dalam perekonomian wilayah.

$$LQ = \frac{\text{PDRB Sektor } i \text{ di Kab atau Kota} / \text{PDRB sektor } i \text{ di provinsi}}{\text{Total PDRB Kab atau Kota} / \text{Total PDRB provinsi}} \dots\dots\dots (2)$$

Penafsiran nilai LQ :

1. $LQ > 1$ merupakan sektor basis atau unggulan dengan sektor terspesialisasi dan dapat melayani pasar dalam dan luar daerah.
2. $LQ < 1$ merupakan sektor non basis atau tidak unggulan dengan sektor tidak terspesialisasi dan belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah.
3. $LQ = 1$ merupakan sektor seimbang dengan wilayah acuan atau unggulan dengan spesialisasi sama dengan wilayah acuan dan mampu melayani pasar didalam wilayah.

Metode Shift Share

Shift Share adalah metode yang digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah selama dua periode.

Perhitungan *shift share* dengan menggunakan rumus :

$$PE = KPN + KPP + KPPW \dots\dots\dots (3)$$

$$= (Y_t/Y_{t-1}) + (Y_{it}/Y_{io} - Y_t/Y_o) + (y_{it}/y_{io} - Y_{it}/Y_{io}) \dots\dots\dots (4)$$

$$= (R_a - 1) + (R_i - R_a) + (r_i - R_i) \dots\dots\dots (5)$$

Interpretasi KPP :

1. KPP bernilai positif ($KPP > 0$) pada wilayah atau daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat
2. KPP bernilai negatif ($KPP < 0$) pada wilayah atau daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat.

Interpretasi KPPW :

1. KPPW bernilai positif ($KPPW > 0$) pada sektor yang mempunyai keunggulan komparatif atau mempunyai daya saing.
2. KPPW bernilai negatif ($KPPW < 0$) pada sektor yang tidak mempunyai keunggulan komparatif atau tidak dapat bersaing

Pendekatan Regional

Ekonomi Wilayah

1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk.

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB}{Jumlah \text{ penduduk}} \dots\dots\dots(6)$$

2. Produktivitas Sektoral

Produktivitas sektoral adalah pembagian antara PDRB sektor tertentu dengan penduduk yang bekerja di sektor tersebut.

$$Produktivitas \text{ Sektoral (i)} = \frac{PDRB \text{ Sektor (i)}}{Jumlah \text{ Tenaga Kerja Sektor (i)}} \dots\dots\dots(7)$$

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah.

$$LPEt = [(PDRB \text{ riil pada tahun } t - PDRB \text{ riil pada tahun } t-1) / PDRB_{t-1}] \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

4. Tipologi Klassen

Tipologi klassen adalah model yang paling populer untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah dengan menggunakan basis data besaran pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi dengan pembagian berdasarkan rata-rata. Kriteria untuk Tipologi Klassen dituangkan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	Y _i > Y	Y _i < Y
r _i > r	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
r _i < r	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Sumber : Budiharsono, 2001

Struktur Ruang

1. Metode Skalogram

Skalogram digunakan untuk mengetahui hirarki pusat-pusat pengembangan dan sarana-prasarana pembangunan yang ada di suatu wilayah (Guttman, 1950).

$$COR = \frac{(Jumlah \text{ total fasilitas} - Jumlah \text{ kesalahan})}{(Jumlah \text{ total fasilitas})} \dots\dots\dots(9)$$

$$C = \frac{Nilai \text{ sentralitas tiap jenis fasilitas}}{Jumlah \text{ satuan tiap jenis fasilitas}} \dots\dots\dots(10)$$

$$Panjang \text{ kelas} = \frac{Bobot \text{ Indeks Sentralitas Tertinggi}}{Bobot \text{ Indeks Terendah}} \dots\dots\dots(11)$$

2. Sistem Perkotaan

Sistem kota-kota berarti hubungan antara beberapa kota yang terjadi secara saling terkait, sehingga dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota-kota itu dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Teknik analisis yang digunakan adalah metode Christaller berpendapat bahwa perbandingan jumlah penduduk antara kota orde lebih tinggi dengan kota orde setingkat lebih rendah setidaknya tiga kali lipat. Misalnya, kota orde 1 jumlah penduduknya tiga kali lipat dibandingkan penduduk kota orde 2 atau kota orde 2 penduduknya paling tinggi hanya sepertiga penduduk kota orde 1, demikian seterusnya.

3. Model Gravitasi

Model gravitasi dapat membantu perencana wilayah untuk memperkirakan daya tarik suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.

$$I = G \frac{M_1 \times M_2}{J_{12}^b} \dots\dots\dots(12)$$

4. Tingkat Kecukupan Fasilitas Pelayanan

Tingkat kecukupan fasilitas pelayanan juga seringkali disebut dengan daya dukung fasilitas dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang ada.

$$Ddfi = \frac{\text{Ketersediaan fasilitas}}{\text{Kebutuhan fasilitas}} \dots\dots\dots(13)$$

$$\text{Kebutuhan (Di)} = \frac{\text{Penduduk Eksisting}}{\text{Penduduk SNI}} \dots\dots\dots(14)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

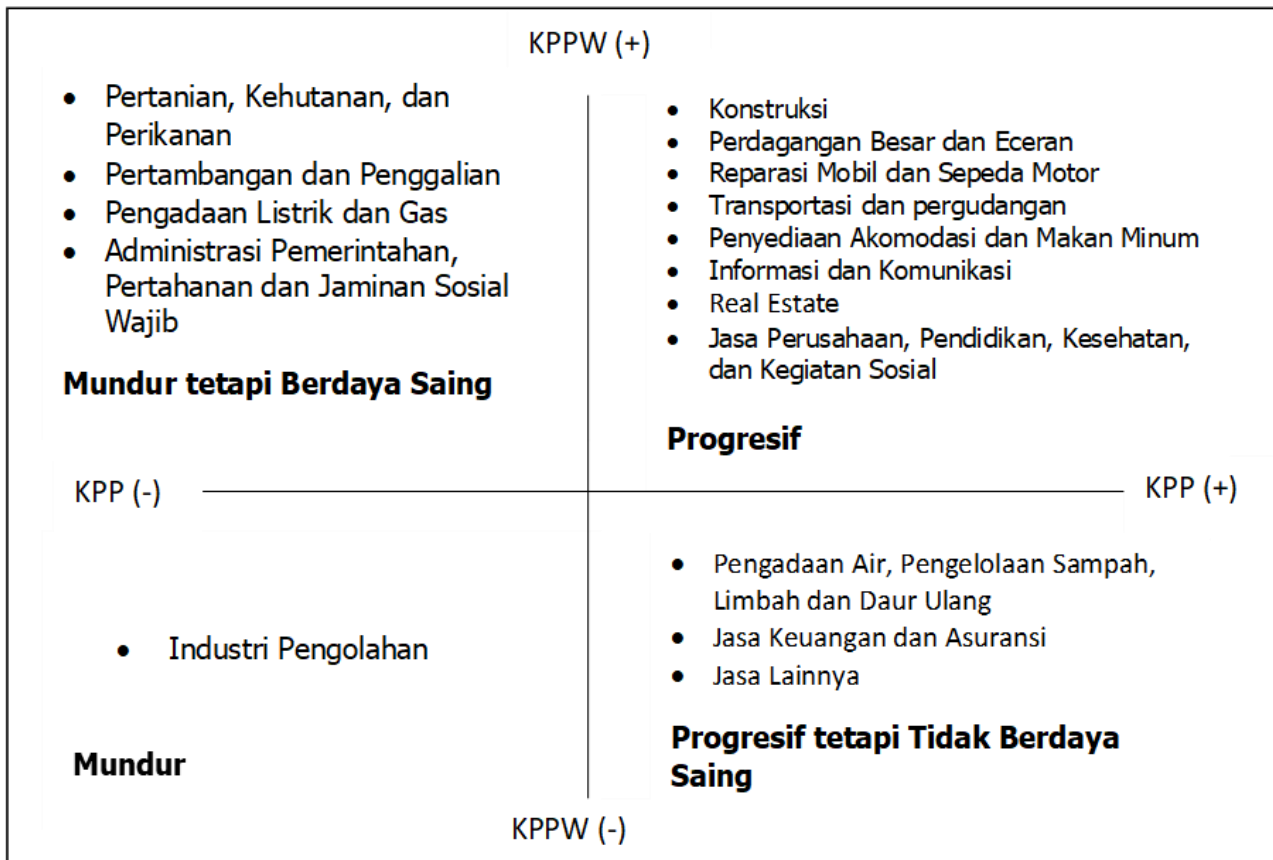
Analisis Penentuan Sektor Unggulan

Berdasarkan analisis basis ekonomi dan sektor unggulan dapat diketahui bahwa kontribusi sektor terbesar adalah industri pengolahan. Di Kabupaten Bogor terdapat 5 sektor basis yang melayani pasar dalam dan luar wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor terdapat pada sektor informasi dan komunikasi, konstruksi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Untuk Komponen Pertumbuhan Nasional (KPN) pada dasarnya memiliki nilai yang sama di setiap sektor ekonomi. Sedangkan KPP memiliki dua kriteria berdasarkan nilai yang diperoleh yaitu apabila $KPP > 0$ maka sektor tersebut dapat tumbuh cepat dan apabila $KPP < 0$ maka sektor tumbuh lambat (**Gambar 1**). Produktivitas sektor terbesar di Kabupaten Bogor adalah industri pengolahan namun berdasarkan hasil analisis industri pengolahan merupakan sektor yang tumbuh lambat. Hal ini juga dialami oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Untuk KPPW juga memiliki klasifikasinya sendiri yaitu $KPPW > 0$ maka sektor tersebut mempunyai daya saing dan apabila $KPPW < 0$ maka sektor tidak mempunyai daya saing. Sektor yang tidak mempunyai daya saing adalah sektor industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa keuangan dan asuransi. Tipologi sektor hasil penggabungan Nilai LQ dan KPPW di Kota Bogor ditampilkan dalam **Tabel 2**, sedangkan hasil Tipologi Klassen untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten atau kota ditampilkan dalam **Gambar 2**.

Tabel 2. Tipologi Sektor Berdasarkan Gabungan Nilai LQ dan KPPW

Lapangan Usaha	LQ	KPPW	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Non Basis	10,102	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing
Pertambangan dan Penggalian	Basis	7,99	Sektor Basis dan Berdaya Saing
Industri Pengolahan	Basis	-1,637	Sektor Basis dan Tidak Berdaya Saing
Pengadaan Listrik dan Gas	Non Basis	0,41	Sektor Non Basis dan Tidak Berdaya Saing
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Basis	-1,017	Sektor Basis dan Tidak Berdaya Saing
Konstruksi	Basis	15,335	Sektor Basis dan Berdaya Saing
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Non Basis	5,592	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing
Transportasi dan Pergudangan	Non Basis	3,986	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Basis	4,487	Sektor Basis dan Berdaya Saing
Informasi dan Komunikasi	Non Basis	2,84	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing
Jasa Keuangan dan Asuransi	Non Basis	-4,389	Sektor Non Basis dan Tidak Berdaya Saing
Real Estat	Non Basis	2,652	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing
Jasa Perusahaan	Non Basis	0,953	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Non Basis	5,538	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing
Jasa Pendidikan	Non Basis	6,362	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing

Lapangan Usaha	LQ	KPPW	Keterangan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Non Basis	7,244	Sektor Non Basis dan Berdaya Saing
Jasa lainnya	Non Basis	-0,339	Sektor Non Basis dan Tidak Berdaya Saing



Gambar 1. Tipologi Sektor Berdasarkan Komponen KPP-KPPW.

Analisis Ekonomi Wilayah

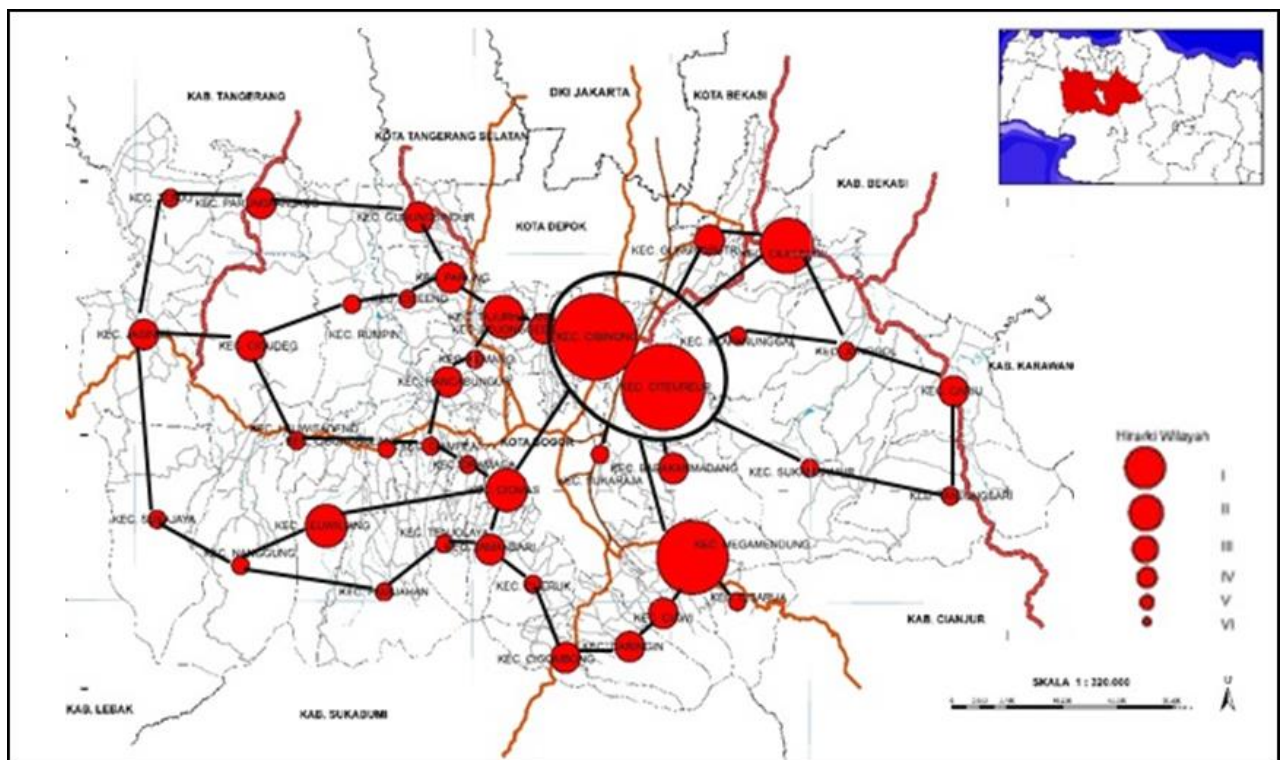
Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat menghasilkan rata-rata 5,61% dan 33,60 juta. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor sebesar 9,77%, Kota Banjar 8,80% dan Kota Bandung 7,63%. PDRB per kapita tertinggi terdapat di Kota Tasikmalaya 105,56 juta, Kabupaten Karawang 73,51 juta dan Kabupaten Bekasi 63,45 juta. Berdasarkan tipologi klassen dengan pendekatan daerah, Kabupaten Bogor termasuk dalam wilayah berkembang cepat.

Analisis Struktur Ruang

Sistem perkotaan Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap perkembangan pusat pelayanan atau struktur ruang wilayah hal ini dikarenakan banyaknya wilayah yang berbasis perkotaan cenderung memiliki perkembangan wilayah yang cepat dibanding wilayah lainnya yang masih sedikit memiliki sistem perkotaan di wilayahnya. Dalam struktur ruang juga, peran tingkat kecukupan fasilitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap pendukung aktivitas penduduk. Adanya tingkat kecukupan fasilitas pelayanan menunjukkan daya dukung fasilitas. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, daya dukung fasilitas di Kabupaten Bogor telah mampu mendukung kebutuhan penduduk saat ini. Berdasarkan data hirarki wilayah dan interaksi wilayah di Kabupaten Bogor membentuk sebuah pola struktur ruang yaitu multi nodal (**Gambar 3**). Multi nodal merupakan struktur ruang yang terdiri dari pusat, sub pusat dan sub-sub pusat yang saling terhubung satu sama lain, sub pusat terhubung dengan pusat dan sub-sub pusat berhubungan pusat. Multi nodal termasuk dalam pusat-pusat pelayanan kota metropolitan.



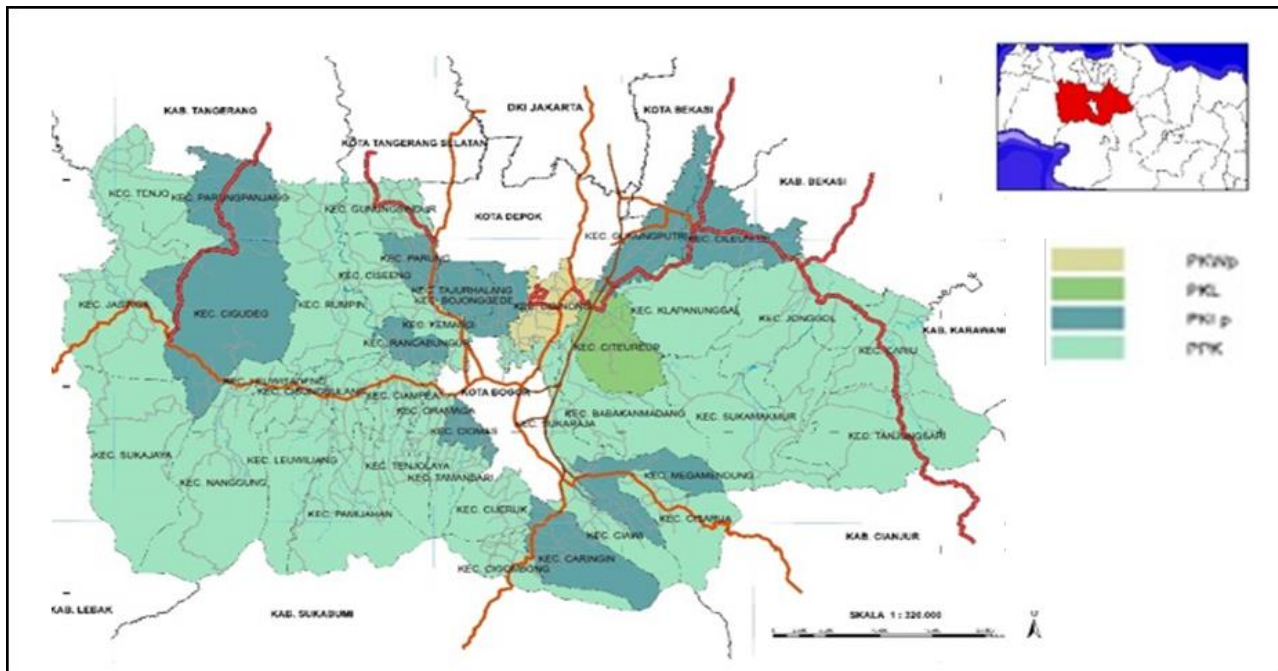
Gambar 2. Tipologi Klassen Provinsi Jawa Barat dirinci Berdasarkan Kabupaten/Kota.



Gambar 3. Peta Bentuk Struktur Ruang Kota.

PKWp terdapat pada Kecamatan Cibinong. Untuk PKL yang terdapat di Kecamatan Citeureup berfungsi untuk melayani skala kabupaten dan beberapa kecamatan. Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Megamendung

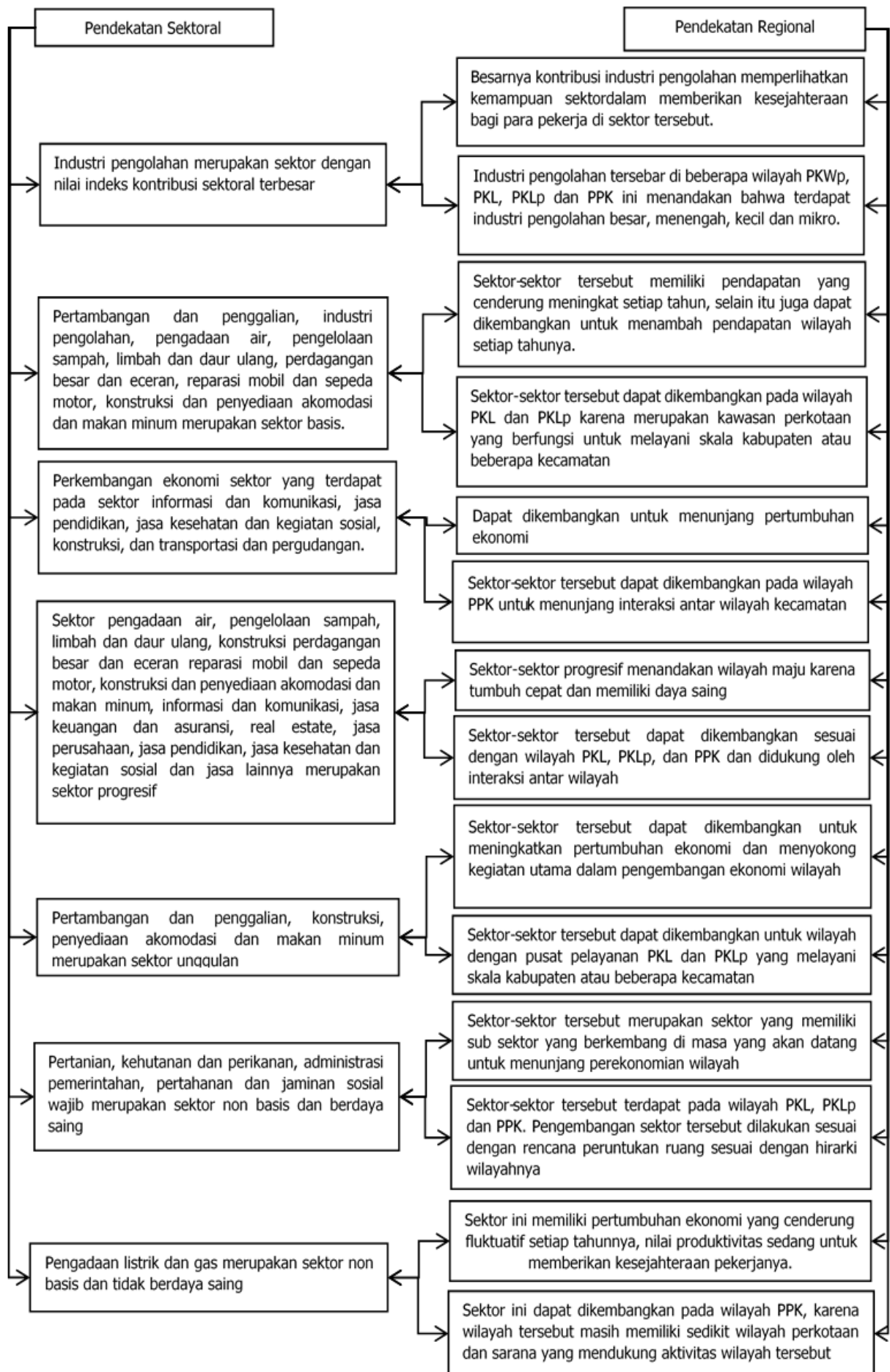
dan Kecamatan Gunungputir merupakan PKLp. Wilayah kecamatan lainnya termasuk dalam PPK terdapat pada wilayah Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Dramaga dan wilayah kecamatan lainnya (**Gambar 4**).



Gambar 4. Peta Struktur Ruang Wilayah.

Analisis Keterkaitan Pendekatan Sektor dan Regional

Setelah melakukan analisis berdasarkan pendekatan sektoral dan regional, kedua pendekatan dalam pengembangan wilayah tidak dapat berjalan sendiri dalam perencanaan. Berdasarkan hasil analisis pendekatan regional, adanya fluktuasi dalam pendapatan wilayah dan keterpusat pelayanan serta kecukupan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Bagan keterkaitan pendekatan sektoral dan regional dituangkan dalam **Gambar 5**.



Gambar 5. Keterkaitan Pendekatan Sektoral dan Regional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan pendekatan sektoral dan regional, kedua pendekatan ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari hasil masing-masing analisis pendekatan sektoral dan regional, sektoral berkembang akan diarahkan pengembangannya sesuai dengan wilayah atau interaksi dan kecukupan fasilitas yang terdapat di wilayah tersebut. Arahan pengembangan wilayah Kabupaten Bogor didasarkan keterkaitan pendekatan sektoral dan regional, potensi wilayah dan rencana pembangunan wilayah yang sudah ada. Beberapa arahan pengembangan wilayah mengarah pada pengembangan dengan memprioritaskan pada sektor-sektor unggulan, pengembangan sektor-sektor berkembang, pengembangan sektor-sektor yang diprediksi pada masa yang datang dapat maju, pengembangan sektor industri pengolahan, pengembangan sektor unggulan dikembangkan untuk wilayah dengan pusat pelayanan, pengembangan sub sektor perikanan dan pertanian untuk meningkatkan potensi yang ada pada sub sektor dalam mendukung perkembangan perekonomian wilayah, program penciptaan lapangan pekerjaan, pemanfaatan wilayah tetangga sebagai pasar potensial, perbaikan jalan yang masih rusak, peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sektor pariwisata dan bisnis kuliner. Arahan-arahan ini nantinya dapat digunakan sebagai masukan sebagai dalam mengevaluasi rencana pembangunan yang sudah ada dan penyusunan rencana pembangunan wilayah selanjutnya terutama dalam pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Bogor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian bermanfaat dan berguna dalam pengembangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bendavid, A. (1974). *Regional Economic Analysis for Practitioners*. New York: Praeger Publishers Inc.
- Budiharsono, S. (2001). *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. 1st edn. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Guttman, L. A. (1950). The Basis for Scalogram Analysis: *Studies in Social Psychology in World War II*, 4.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S. and Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. 3rd edn. Edited by A. E. Pravitasari. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika Offset.